



Tan Swie Ling, *G30S 1965, Perang Dingin & Kehancuran Nasionalisme: Pemikiran Cina Jelata Korban Orba.*

Depok: Komunitas Bambu bekerja sama dengan Lembaga Kajian Sinergi Indonesia, 2010.

Membaca buku karangan Tan Swie Ling ini merupakan sebuah tantangan. Dari judulnya saja, pembaca bisa mengintip topik yang selalu kontroversial. Juga, tebalnya yang hampir 600 halaman, bikin pembaca langsung mengerti buku ini bukan bacaan ringan pengantar tidur. Diperlukan kecermatan dan terutama kesabaran untuk menelusuri kembali pertikaian (ideologi maupun fisik) 1965 dari sudut pandang salah seorang korbannya. Walaupun Tan berhasrat besar mengajak pembaca untuk menengok kembali serangkaian peristiwa yang sering diringkas sebagai “G30S” dari sudut pandangnya, sayang sekali ia tidak menjelaskan darimana seorang “Tan Swie Ling” datang dan di mana posisinya dalam Partai Komunis Indonesia yang mati-matian dibelanya. Tan hanya menggambarkan dirinya sebagai seorang “Cina jelata korban Orba.” Jadi, Tan bukan semata korban karena ke-PKI-annya, tapi juga karena ke-Cina-annya. Kemajemukan pengalaman sebagai korban inilah yang menjadi latar belakang pengaturan buku menjadi dua bagian: Bagian Pertama tentang hal-hal seputar G30S dan efeknya, dan Bagian Kedua berisi renungan akan keadaan dan situasi orang Tionghoa di negara Indonesia merdeka.

Di bagian pertama Tan menguraikan pengalamannya sebagai anggota sebuah partai yang dituduh percobaan kudeta, dan kemudian sebagai tahanan politik selama

13 tahun sebuah rejim yang anti-komunis. Di sini Tan sekaligus menawarkan teorinya tentang siapa dalang di balik serangkaian peristiwa ini, yaitu pembunuhan enam orang jendral dan pembalasan bertubi-tubi terhadap PKI sebagai yang tertuduh. Tan meletakkan peristiwa G30S dalam konteks Perang Dingin dan tanpa ragu membeberkan simpul-simpul penanda yang merujuk pada keterlibatan CIA – lewat sebuah badan yang menjembatani partai tak berotot ini ke institusi militer Indonesia (Biro Khusus) – bahkan pada mantan orang kuat yang kemudian ternyata paling diuntungkan dengan terbunuhnya para petinggi militer dan dibabat-habisnya PKI, yaitu Mayjen Suharto. Tan tak membantah andil PKI dalam peristiwa G30S, tapi menolak bulat-bulat tuduhan dan konsekwensi yang selama ini dibebankan pada warga partai sampai ke anggota-anggota terkecilnya. Alasannya, karena keberadaan Biro Khusus yang tidak sesuai hirarki tradisional partai (sehingga status orang-orangnya sebagai kader PKI menjadi problematis). Selain itu juga, kader-kader bertuan ganda seperti Syam Kamaruzaman yang berhasil menyusupi partai lewat proses perekrutan yang juga problematis. Reaksi panik dan pengecut kebanyakan kader PKI – yang dicercanya habis-habisan – toh dalam pandangan Tan juga merupakan bukti bahwa PKI tidak merencanakan pengambilalihan kekuasaan lewat jalur kudeta atau adu otot. Posisi Tan sebagai orang dekat Sudisman (ketua PKI terakhir) dan pengalamannya sebagai tahanan G30S/PKI memberinya pengetahuan “orang dalam” (berdasarkan pengamatannya selama di penjara sekaligus perbincangan dengan sesama tahanan) yang membuatnya lebih condong pada teori keterlibatan CIA dalam peristiwa G30S dan sekaligus mendiskredit analisis akademis yang semata-mata bersumber pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP itu tidak lebih dari sampah, tuding Tan, karena diperas dari tahanan yang tidak lagi mampu menahan siksaan.

Antara bagian pertama dan bagian kedua buku ini hampir tak bisa ditarik garis lurus. Satu-satunya penghubung adalah si penulis sendiri yang kebetulan merupakan satu dari segelintir orang Tionghoa yang cukup peduli dan bernyali untuk berpolitik. Akibatnya cukup jelas: secara lapis- ganda jadi mangsa politik Orde Baru yang mengidentikan Cina dengan komunis. Di bagian pertama buku, Tan bertumpu pada pengalaman pribadinya sebagai tapol. Sementara di bagian kedua buku, Tan berbicara atas nama kelompok, yaitu warga minoritas Tionghoa yang rata-rata punya pengalaman sama: menyanggah cap Cina di negara Indonesia merdeka dan karenanya kenyang diskriminasi.

Sebagai “Cina” yang sering jadi kambing hitam, Tan juga punya sederet kambing hitam di balik kesengsaraan kelompok minoritas ini: Belanda dan politik pecah belahnya, NICA yang membikin seolah-olah warga Tionghoa berpihak pada Belanda dalam revolusi, Orde Baru, bahkan CIA. Tan juga menyalahkan ketidakpahaman rata-rata masyarakat Indonesia akan asal-usul dan arti bangsa yang sebenarnya, yang baginya tercermin pada tulisan-tulisan Otto Bauer dan Ernest Renan – yaitu suatu kesatuan yang terbentuk dari kesamaan nasib dan kehendak untuk hidup bersama. Bagi Tan, rasa senasib dan sepenanggungan yang muncul dari penjajahan Belanda seharusnya membuat warga Tionghoa diterima sebagai saudara sebangsa di Indonesia. Namun, kehendak untuk hidup bersama dinilainya telah cacat lahir karena undang-undang kewarganegaraan Indonesia merdeka yang memilah asli dari tidak asli. Sebagai penawar untuk semua masalah ini, Tan memberi saran yang tidak baru tapi memang layak untuk diulang: agar warga Tionghoa aktif berpartisipasi dalam politik, membangun otot politik supaya tidak gampang dijadikan kambing hitam oleh penguasa.

Sama seperti pembelaannya pada PKI yang gigih, Tan membela warga Tionghoa dengan menggebu, sehingga kadang terkesan sembrono. Warga Tionghoa, misalnya, dalam penjabaran Tan terkesan sebagai sebuah kelompok yang monolitik. Padahal dari pandangan ketiga delegasi warga Tionghoa yang diundang untuk memberi masukan dalam perancangan Undang-undang Dasar 1945 (ketiganya dikutip dalam buku Tan), tampak jelas bahwa yang disebut kelompok Tionghoa sebenarnya punya latar belakang dan orientasi politik yang berbeda-beda. Alasan ini juga yang menyebabkan satu dari ketiga delegasi Tionghoa menolak kewarganegaraan Indonesia, sedangkan satu lagi meminta keleluasaan hukum bagi mereka yang tidak setuju menjadi warganegara Indonesia. Ruang manuver untuk menolak kewarganegaraan Indonesia inilah yang kemudian jadi momok bagi seluruh warga Tionghoa, karena dengan begitu keanggotaan mereka dalam kebangsaan Indonesia menjadi hal yang terus-menerus perlu dibuktikan.

Keteledoran lain adalah cibiran Tan terhadap penolakan beberapa tokoh dan kelompok nasionalis Indonesia terhadap tokoh-tokoh nasionalis Tionghoa seperti Kwee Kek Beng, mantan pemimpin redaksi *Sin Po*. Agaknya Tan lupa bahwa Kwee bukan sekedar seorang nasionalis, tapi juga nasionalis yang berkiblat ke Tiongkok, mengikuti paham kelompok koran yang dikepalainya. Walau demikian, Tan cukup jeli melihat bahwa Undang-undang Kewarganegaraan tahun 2006 yang didengung-

dengungkan sebagai undang-undang revolusioner sebenarnya masih menyimpan ketidakrelaan untuk secara total melepaskan pembatas antara warganegara “asli” dan warganegara keturunan Tionghoa yang sudah terlanjur identik sebagai “tidak asli.”

Pada akhirnya, buku ini berharga untuk dibaca (dan ditulis) sebagai rekaman pengalaman seorang tahan politik di masa Indonesia merdeka, setara dengan pentingnya beberapa catatan serupa dalam situasi politik yang berbeda, misalnya memoir IFM Salim *Lima Belas Tahun Digul* dan Oey Tiang Tjoei *Pengalaman Kita Dalem Pengasingan* sebagai tapol Belanda, dan tulisan pengalaman Nio Joe Lan *Dalem Tawanan Djepang* dan Kho An Kim *Pendjara Fasis* sebagai tapol Jepang. Menyandingkan tulisan mereka dengan pengalaman Tan, paling tidak satu kesimpulan bisa ditarik: bahwa kekejaman pada lawan politik tidak ada hubungannya dengan warna kulit si penguasa – Belanda, Jepang, dan sesama Indonesia tidak kalah sadisnya. Sehubungan dengan tema buku ini, patut dipertanyakan: Lantas apa guna nasionalisme yang hanya mengganti warna kulit sang penguasa?

Pembaca juga bakal terkecoh kalau mengharap menemukan memoir Tan Swie Ling di sini, layaknya memoir Salim yang membuka diri dengan mengakui kelemahan dan ketakutannya sebagai tahanan. Tan berbagi catatan pengalaman, tapi bagian terbesar tetaplah pandangan-pandangan politiknya. Seperti komentar di Kata Pengantar buku ini, Tan memulai ceritanya pada tahun 1965, ketika digerebek bersama Sudisman di tempat persembunyian mereka. Tapi bagaimana perjalanannya hingga sampai pada titik itu, pembaca dibiarkan dalam gelap, hingga tidak mudah untuk berempati dan mencoba melihat berbagai hal yang dipaparkan Tan lewat kacamata si penulis. Ibaratnya, Tan akhirnya membuka mulut, tapi masih emoh membuka diri. Satu-satunya bagian dimana pembaca merasa bisa “connect” dengan Tan adalah ketika penulis menceritakan saat-saat terakhir sebelum Sudisman dieksekusi, mengucapkan selamat jalan pada pemimpin yang dikaguminya itu dengan menyanyikan lagu “Pujaan Partai” sambil berurai air mata. Di sini tidak hanya sipir dan para tahanan, pembaca pun hanyut dalam emosi.

(Elizabeth Chandra)

Rujukan

Kho An Kim. 1947. *Pendjara fasis: dari neraka ke neraka*. Djakarta: Toko Buku Djaman.

Nio Joe Lan. 1946. *Dalem tawanan Djepang: Boekit Doeri-Serang-Tjimahi, penoetoeran pengidoepan interneeran pada djeman pendoedoekan Djepang*. Djakarta: Lotus.

Salim, I.F.M. Chalid. 1977. *Lima belas tahun Digul, kamp konsentrasi di Nieuw Guinea, tempat persemaian kemerdekaan Indonesia* (Judul asli: *Vijftien jaar Boven-Digoel, concentratiekamp op Nieuw-Guinea, bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid*; penerjemah Hazil Tanzil and Taufik Salim). Jakarta: Bulan Bintang

Oey Tiang Tjoei. 1942. *Pengalaman kita dalem pengasingan: Garoet-Soekaboemi dan Noesakambangan (Tjilatjap)*. Hong Po.